

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Z., Hadi, L., Sahrudin, & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2020). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Prenadamedia Group.
- Safira, E. M. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo.
- Sihombing, E. I. (2017). *Segi-segi Hukum Tanah Nasional Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (3rd ed.)*. Penerbit Universitas Tri Sakti.
- Sinaga, H. S. (2007). *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*. Pustaka Sutra.
- Subekti, P. (2020). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R. P. (2013). *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata (3rd ed.)*. P.T Alumni.
- Saranaung, M. F. (n.d.). *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*.
- Hudaningrum, F. (2014). *Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Sevanda, dan Itikad Baik*. Sebelas Maret.

Peraturan Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-hak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 Tentang Pembayaran Bea Materai.

Jurnal

Baharuddin. (2016). Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah. *Jurnal Keadilan Progresid*, 5(1), 151.

Beli, J., Yang, T., Dengan, D., Pengadilan, P., & Amelia, U. (2021). Jual Beli Tanah Yang Disempurnakan Dengan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 676/PDT.G/2016/PN.SBY). *Indonesian Notary*, 3(3), 609.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3288adba045/apakah-kuitansi->

- Dwitamara, T. (2019). Penganturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Jurnal Hukum, 1*(2), 9.
- Dzaky, M. (2022). Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 4*(6), 483.
- Gusmawati Kartika, Masri, E., & Handayani, O. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *Jurnal Hukum Sasana, 9*(1), 111.
- Gusmawati, K., Masri, E., & Handayani, O. (2023). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *Jurnal Hukum Sasana, 9*(1), 12.
- Harahap, Mhd. Y. (2020). Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 1*(3), 12.
- Idami, Z. (2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya. *Jurnal Dinamika Hukum, 12*(1), 60–66.
- Jati, A. Z. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali. *Jurnal Ilmu Hukum, 2*(2), 124.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 6*(11).

- Legianty, F. A., & Yunanto, Y. (2019). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Melanggar Asas Nemo Plus Juris Pada Pendaftaran Tanah. *Notarius*, 12(2), 1027–1039.
- Managin, A. S. M. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 178. <http://kuhap.or.id/data/wp-content/uploads/2013->
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, II(1), 14.
- Sancaya, I. W. W. (2013). Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44083.
- Widya, & dkk. (2016). Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah UMur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai. *USU Law Journal*, 4(3), 174–179.
- Yava Dwilestari, I., Risma, A., & Ilyas, M. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATASAN UMUR DEWASA SEBAGAI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 13.